



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

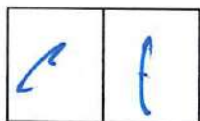
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK  
dan  
BUPATI SOLOK

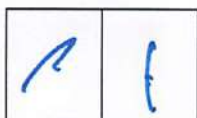
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif



besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *deviden*, *royalty*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.391.109.035.955,00 berkurang sebesar Rp76.759.277.658,12 sehingga menjadi Rp1.314.349.758.296,88 dengan rincian sebagai berikut:

- |  |      |                      |  |
|--|------|----------------------|--|
| a. Pendapatan Daerah                             |      |                      |  |
| 1. semula  | Rp   | 1.346.109.035.955,00 |  |
| 2. bertambah/(berkurang)                         | (Rp) | 45.236.207.283,00    |  |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan              | Rp   | 1.300.872.828.672,00 |  |
| b. Belanja Daerah                                |      |                      |  |
| 1. semula  | Rp   | 1.391.109.035.955,00 |  |
| 2. bertambah/(berkurang)                         | (Rp) | 76.759.277.658,12    |  |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                 | Rp   | 1.314.349.758.296,88 |  |
| c. Pembiayaan                                    |      |                      |  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                         |      |                      |  |
| 1) semula  | Rp   | 45.000.000.000,00    |  |
| 2) bertambah/(berkurang)                         | (Rp) | 31.523.070.375,12    |  |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan   | Rp   | 13.476.929.624,88    |  |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                        |      |                      |  |
| 1) semula  | Rp   | 0,00                 |  |
| 2) bertambah/(berkurang)                         | Rp   | 0,00                 |  |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  | Rp   | 0,00                 |  |
| c. Pembiayaan Netto                              |      |                      |  |
| 1) semula  | Rp   | 45.000.000.000,00    |  |
| 2) bertambah/(berkurang)                         | (Rp) | 31.523.070.375,12    |  |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan         | Rp   | 13.476.929.624,88    |  |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp   | 0,00                 |  |

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- |   |      |                      |  |
|---|------|----------------------|--|
| a. Pendapatan Asli Daerah                       |      |                      |  |
| 1) semula                                       | Rp   | 139.987.754.098,00   |  |
| 2) bertambah/(berkurang)                        | Rp   | 5.381.267.101,00     |  |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp   | 145.369.021.199,00   |  |
| b. Pendapatan Transfer                          |      |                      |  |
| 1) semula                                       | Rp   | 1.206.121.281.857,00 |  |
| 2) bertambah/(berkurang)                        | (Rp) | 50.617.474.384,00    |  |



Jumlah Pendapatan Transfer Rp 1.155.503.807.473,00  
setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Hasil Pajak Daerah
- |   |      |                   |
|---|------|-------------------|
| 1. semula                                   | Rp   | 68.641.912.570,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                    | (Rp) | 500.754.697,00    |
| Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp   | 68.141.157.873,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah
- |   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| 1. semula                                       | Rp | 52.251.025.791,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                        | Rp | 4.722.242.074,00  |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp | 56.973.267.865,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| 1. semula  | Rp | 8.409.815.737,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)   | Rp | 659.025.027,00   |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp | 9.068.840.764,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| 1. semula  | Rp | 10.685.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)   | Rp | 500.754.697,00    |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp | 11.185.754.697,00 |

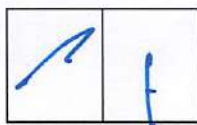
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| 1. semula  | Rp   | 1.173.842.921.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                           | (Rp) | 86.958.023.890,00    |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp   | 1.086.884.897.110,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| 1. semula                                      | Rp | 32.278.360.857,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                       | Rp | 36.340.549.506,00 |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan | Rp | 68.618.910.363,00 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- |  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| 1) semula                                | Rp   | 1.072.233.418.528,49 |
| 2) bertambah/(berkurang)                 | (Rp) | 48.645.127.487,89    |
| Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | Rp   | 1.023.588.291.040,60 |



b. Belanja Modal		
1) semula	Rp	146.497.927.616,51
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	21.885.447.029,23)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	124.612.480.587,28
c. Belanja Tidak Terduga		
1) semula	Rp	5.775.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	3.435.382.666,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.339.617.334,00
d. Belanja Transfer		
1) semula	Rp	166.602.689.810,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	2.793.320.475,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp	163.809.369.335,00

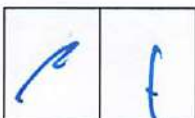
Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

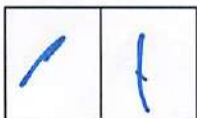
a. Belanja Pegawai		
1. semula	Rp	703.809.595.208,92
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	27.546.442.007,69)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	676.263.153.201,23
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. semula	Rp	350.890.633.610,13
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	22.145.055.480,20)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	328.745.578.129,93
c. Belanja Bunga		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Subsidi		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Belanja Hibah		
1. semula	Rp	17.533.189.709,44
2. bertambah/(berkurang)	Rp	1.046.370.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	18.579.559.709,44
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	0,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah		
1. semula	Rp	0,00



2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan mesin		
1. semula	Rp	34.756.483.439,45
2. bertambah/(berkurang)	Rp	3.567.882.153,77
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp	38.324.365.593,22
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. semula	Rp	38.592.208.544,06
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	3.979.761.712,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	34.612.446.832,06
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. semula	Rp	69.169.636.210,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	24.389.215.283,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	44.780.420.927,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. semula	Rp	3.947.204.423,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	2.948.042.812,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	6.895.247.235,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. semula	Rp	32.395.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	32.395.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:		
a. semula	Rp	5.775.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp)	3.435.382.666,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.339.617.334,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
a. Belanja Bagi Hasil		
1. semula	Rp	7.766.753.810,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	571.022.025,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	8.337.775.835,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. semula	Rp	158.835.936.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	3.364.342.500,00



Jumlah Belanja Bantuan Rp 155.471.593.500,00  
Keuangan setelah  
Perubahan

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- |                                 |      |                    |
|---------------------------------|------|--------------------|
| 1. semula                       | Rp   | 45.000.000.000,00  |
| 2. bertambah/(berkurang)        | (Rp) | 31.523.070.375,12) |
| Jumlah Penerimaan               | Rp   | 13.476.929.624,88  |
| Pembiayaan setelah<br>Perubahan |      |                    |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |                                 |    |      |
|---------------------------------|----|------|
| 1. semula                       | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)        | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran              | Rp | 0,00 |
| Pembiayaan setelah<br>Perubahan |    |      |

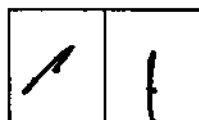
#### Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- |                                 |      |                    |
|---------------------------------|------|--------------------|
| 1. semula                       | Rp   | 45.000.000.000,00  |
| 2. bertambah/(berkurang)        | (Rp) | 31.523.070.375,12) |
| Jumlah SiLPA Tahun              | Rp   | 13.476.929.624,88  |
| Sebelumnya setelah<br>Perubahan |      |                    |

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pergeseran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah, dan tidak dapat diprediksikan

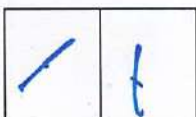


- sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III memuat Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI memuat Daftar Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X memuat Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- l. Lampiran XII memuat Daftar Piutang Daerah;



- m. Lampiran XIII memuat Daftar Penyertaan Modal (Investasi);
  - n. Lampiran XIV memuat Daftar Rakapitulasi Aset Tetap;
  - o. Lampiran XV memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum selesai dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2025;
  - p. Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan; dan
  - q. Lampiran XVII memuat Daftar Pinjaman Daerah.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 01 September 2025

BUPATI SOLOK,



JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 01 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT  
: (8/64/2025).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyusun APBD sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Pasal 228 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan agar terselenggaranya penganggaran pendapatan dan belanja Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

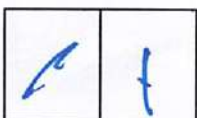
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 125





Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 8 Tahun 2025  
Tanggal : 1 September 2025

### KABUPATEN SOLOK

#### RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BER TAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>139.987.754.098,00</b>	<b>145.369.021.199,00</b>	<b>5.381.267.101,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	68.641.912.570,00	68.141.157.873,00	-500.754.697,00
4.1.02	Retribusi Daerah	52.251.025.791,00	56.973.267.865,00	4.722.242.074,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.815.737,00	9.068.840.764,00	659.025.027,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.685.000.000,00	11.185.754.697,00	500.754.697,00
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.206.121.281.857,00</b>	<b>1.155.503.807.473,00</b>	<b>-50.617.474.384,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.842.921.000,00	1.086.884.897.110,00	-86.958.023.890,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.278.360.857,00	68.618.910.363,00	36.340.549.506,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.346.109.035.955,00</b>	<b>1.300.872.828.672,00</b>	<b>-45.236.207.283,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.072.233.418.528,49</b>	<b>1.023.588.291.040,60</b>	<b>-48.645.127.487,89</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	703.809.595.208,92	676.263.153.201,23	-27.546.442.007,69
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.890.633.610,13	328.745.578.129,93	-22.145.055.480,20
5.1.05	Belanja Hibah	17.533.189.709,44	18.579.559.709,44	1.046.370.000,00
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>146.497.927.616,51</b>	<b>124.612.480.587,28</b>	<b>-21.885.447.029,23</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.756.483.439,45	38.324.365.593,22	3.567.882.153,77
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.592.208.544,06	34.612.446.832,06	-3.979.761.712,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.169.636.210,00	44.780.420.927,00	-24.389.215.283,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.947.204.423,00	6.895.247.235,00	2.948.042.812,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	32.395.000,00	0,00	-32.395.000,00
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.775.000.000,00</b>	<b>2.339.617.334,00</b>	<b>-3.435.382.666,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	2.339.617.334,00	-3.435.382.666,00
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>166.602.689.810,00</b>	<b>163.809.369.335,00</b>	<b>-2.793.320.475,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.766.753.810,00	8.337.775.835,00	571.022.025,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	158.835.936.000,00	155.471.593.500,00	-3.364.342.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.391.109.035.955,00</b>	<b>1.314.349.758.296,88</b>	<b>-76.759.277.658,12</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-45.000.000.000,00</b>	<b>-13.476.929.624,88</b>	<b>31.523.070.375,12</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>13.476.929.624,88</b>	<b>-31.523.070.375,12</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	-31.523.070.375,12
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>13.476.929.624,88</b>	<b>-31.523.070.375,12</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



Kab. Solok, 1 September 2025  
Bupati

JON FIRMAN PANDU